

**OPTIMALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN
2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

Destyana Mulyana

NPP. 30.0534

Asal Pendaftaran Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: destyana32@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Didi Sudiana, SE, MM

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on enforcing regional regulations regarding waste management in the City of Tasikmalaya. **Purpose:** The aim of this research is to find out how to optimize the enforcement of regional regulations by the Civil Service Police Unit of the City of Tasikmalaya in dealing with Waste Management in the City of Tasikmalaya, and what are the obstacles experienced by the Satpol PP in the enforcement process, as well as the efforts made by the Satpol PP in the enforcement process to run smoothly. **Method:** This study uses a qualitative research method that is descriptive with an inductive approach. Data collection techniques used in this research are observation, interview, and documentation techniques. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are optimizing the enforcement of regional regulations on waste management that have been going quite well but are still not optimal, because there are still several obstacles that are obstacles and there are efforts by the Satpol PP in optimizing enforcement of regional regulations. **Conclusion:** Optimizing the Enforcement of Regional Regulations on Waste Management has been going quite well but it is still not optimal because the government immediately issued policies such as the mandatory clean Friday program and the formation of the Tasik Resik Waste Management Task Force still has several obstacles within the scope of the Civil Service Police Unit itself, with limited human resources , facilities and infrastructure, and budget, which can affect the implementation of the duties of the Civil Service Police Unit in enforcing these regional regulations.

Keywords: *Optimization, Law Enforcement, Satpol PP, Trash Management*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi penegakan peraturan daerah yang dilakukan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya dalam menangani Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya, dan apa saja hambatan yang dialami Satpol PP dalam proses penegakan, serta upaya yang dilakukan Satpol PP dalam proses penegakan agar berjalan lancar. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu optimalisasi penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sudah berjalan cukup baik namun masih belum optimal, dikarenakan masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat serta adanya upaya Satpol PP dalam pelaksanaan optimalisasi penegakan peraturan daerah. **Kesimpulan:** Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah sudah berjalan cukup baik namun masih belum optimal dikarenakan pemerintah yang langsung mengeluarkan kebijakan seperti program wajib jumat bersih dan pembentukan Satuan Tugas Pengelolaan Sampah Tasik Resik masih memiliki beberapa hambatan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri, dengan keterbatasan SDM, Sarana dan Prasarana, dan anggaran, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan peraturan daerah tersebut.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Penegakan Hukum, Satpol PP, Pengelolaan Sampah*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Tasikmalaya mengalami permasalahan dalam pengelolaan sampah, dimana masih banyak sampah yang belum terkelola dan banyaknya TPS liar di lingkungan masyarakat Kota Tasikmalaya. Hal ini menjadi faktor adanya permasalahan mengenai sampah yang menumpuk setiap tahunnya. Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 adalah 725.561 jiwa, sedangkan timbulan sampah 3,63 liter/orang/hari atau 0,44 kg/orang/hari, sehingga timbulan sampah Kota Tasikmalaya mencapai 319.247 ton/hari. Pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya meliputi pengurangan dan

penanganan melalui pengangkutan sampah ke TPA. Pengurangan sampah pada tahun 2020 mencapai 7.563 kg/hari atau setara dengan 2,59%. Pengurangan sampah yang dilakukan merupakan hasil pengurangan sampah melalui komunitas 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang terdapat di beberapa lokasi. Sedangkan penanganan sampah melalui pengangkutan sampah ke TPA telah mencapai 165.499,81 kg/hari atau setara dengan 57,77%. Dengan demikian, masih terdapat sampah yang belum tertangani dan terangkut ke TPA. Pengangkutan sampah merupakan kegiatan operasional pengelolaan sampah yang bermula dari lokasi pengumpulan sampah terakhir (TPS, TPS 3R, Transfer Depo) menuju TPA atau TPST (Anonim, 2019). Tingkat pengangkutan sampah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sarana (kendaraan) pengangkutan sampah, jumlah sampah yang akan diangkut dan biaya operasional pengangkutan sampah (Subur et al., 2006).

Keberhasilan pengelolaan, bukan hanya tergantung aspek teknis semata, tetapi mencakup juga aspek non teknis, seperti bagaimana mengatur sistem agar dapat berfungsi, bagaimana lembaga atau organisasi yang sebaiknya mengelola, bagaimana membiayai sistem tersebut dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana melibatkan masyarakat penghasil sampah dalam aktivitas penanganan sampah. Untuk menjalankan sistem tersebut, harus melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti perencanaan kota, geografi, ekonomi, kesehatan masyarakat, sosiologi, demografi, komunikasi, konservasi. Sebelum Undang-Undang No.18 Tahun 2008 dikeluarkan, kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia memposisikan bahwa pengelolaan sampah merupakan sebuah sistem yang terdiri dari 5 komponen sub sistem, yaitu peraturan atau hukum, kelembagaan dan organisasi, teknik operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat.

Pada tingkat daerah, pemerintah Kota Tasikmalaya telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk mewujudkan kembali Kota Tasikmalaya sebagai Tasik Kota Resik yang bersih dan sehat. Dengan dikeluarkannya berbagai peraturan baik di tingkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, kebersihan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik, ternyata masih belum mampu untuk mengatasi masalah persampahan di Kota Tasikmalaya.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Tindakan sebagian masyarakat masih membuang sampah ke saluran air, selokan, sungai, atau badan air yang ada. Apabila hal ini terjadi pada saat musim hujan mampu menghambat aliran air pada saluran-saluran air tersebut sehingga menyebabkan air

meluap dan membawa sampah ke jalan raya, pemukiman penduduk, dan berakhir menjadi tempat berkembang biaknya lalat dan tikus, dan juga mampu menyebabkan pencemaran tanah, udara, dan air yang memungkinkan berkembangnya penyakit menular.

Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya permasalahan sampah dan bahkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat serta peraturan yang dibuat oleh Pemerintah belum terlaksana dengan baik dalam artian masih ada kalangan masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak mengindahkan aturan ini.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang tentunya memiliki relasi dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan dan juga petunjuk dalam pelaksanaan penelitian. Penulis telah memilih beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh (Ajie, 2019) yang berjudul Pengawasan Pemerintah Kota terhadap pengelolaan sampah Kota Palangkaraya dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangkaraya, meliputi pengawasan SDM dan TPS. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Kahfi, 2020) yang berjudul Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah dengan metode penelitian kajian literature. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masalah sampah dan kendala yang terjadi dengan pengolahan sampah secara umum. Kurangnya kesadaran untuk 3R sampah anorganik. Penelitian yang ketiga yang digunakan sebagai acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh (Fitri dkk, 2021) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu dengan metode penelitian kajian literature. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi dari 3R yang sudah disosialisasikan dan bagaimana pelaksanaan inovasi dari pemerintah untuk mendorong masyarakat di Mojokerto untuk peduli lingkungan. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Marimin, 2018) yang berjudul Peran Satpol Pp Dalam Pengawasan Tambang Emas Tanpa Izin Di Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumer Kabupaten Bengkayang dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang lebih berperan pada pengawasan, bukan pada penegakan Peraturan Daerah seperti yang ada pada tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Karena, tidak di didik dan diangkat sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Konsekuensinya, dalam menegakkan Peraturan Daerah, kewenangan Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang hanya terbatas pada tindakan hukum (kepolisian) Non Yustisial, lebih kepada pengawasan dan pemberdayaan. Sehingga penerapan sanksi pidana berupa pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengganti kerugian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Bengkayang. Penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh (Wira, 2015) yang berjudul Sistem Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejelasan, Ketepatan Waktu, Tanggung Jawab dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana. Kejelasan dalam bertugas memberikan pelayanan terhadap masyarakat mengelola sampah sudah cukup baik, kejelasan saat bertugas dan mengetahui rute kerja dan masing-masing bagian yang telah ditentukan oleh pemerintah, namun dari segi ketepatan waktu petugas masih saja lalai saat bekerja tidak tepat waktu bahkan masih saja petugas kebersihan yang terlihat bersantai saat bekerja, tanggung jawab yang dimiliki petugas kebersihan pun masih tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, mereka tidak bisa mempertanggung jawabkan tugas yang di limpahkan, masih terlihatnya sampah berserakan dimana-mana bahkan semakin meningkatnya jumlah TPS liar yang ada di Kecamatan ini semakin mengotori suasana lingkungan sekitarnya, kelengkapan sarana dan prasarana secara keseluruhan di nilai masih kurang efektif, namun peralatan kebersihan masih manual dan masih kurangnya jumlah armada pengangkutan sampah, dengan keadaan kota Pekanbaru yang tiap tahun berturut-turut pernah mendapatkan piala adipura.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya maka ada beberapa hal yang menunjukkan kebaruan pada penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa kebaruan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah lokasi penelitian yang dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh (Ajie, 2019) yang dilakukan di Kota Palangkaraya, selanjutnya penelitian (Fitri dkk, 2021) yang dilakukan di daerah Mojokerto, lalu penelitian (Marimin, 2018) yang dilakukan di Kabupaten Bengkayang, dan penelitian (Wira, 2015) yang dilakukan di daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan dilaksanakan di Kota Tasikmalaya. Selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh (Kahfi, 2020) yang menggunakan metode penelitian kajian literature Begitu juga penelitian (Fitri dkk, 2021) yang menggunakan metode penelitian kajian literature. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

II. METODE

Penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 6 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja serta masyarakat. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis optimalisasi penegakan peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya menggunakan teori Optimalisasi Siringoringo (2005). Selain itu penulis juga menyingkronkan dengan peraturan yang memiliki relasi terhadap permasalahan yang diteliti. Cara penyajiannya pun disusun berdasarkan rumusan masalah dan didukung dengan penggunaan dari teori dan legalistik dari masing masing rumusan masalah.

3.1 Penegakan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah

Dasar hukum merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menegakan peraturan. Dasar hukum dijadikan sebagai sebuah acuan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban penegakan sebuah peraturan. Dengan demikian semakin banyak sampah yang belum terkelola di Kota Tasikmalaya membuat pemerintah makin memperketat segala peraturan yang ada, pemerintah menciptakan aturan yang bersifat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini Satuan

Polisi Pamong Praja diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Di dalam pelaksanaannya, dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki tugas dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah, namun Satuan Polisi Pamong Praja ikut dalam penegakannya. Dalam hal pengendalian dan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup yang dilakukan dalam proses pengelolaan sampah tidak dilakukan secara khusus oleh pemerintah, karena bentuk pengawasan dan pengendalian dinas tersebut ialah dengan turun langsung di lapangan melakukan penjemputan sampah dan sekaligus melakukan pengawasan dalam pengelolaan sampah di masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi kerjasama dengan Pemerintah Kota agar segala urusan mengenai pengelolaan sampah dapat terlaksana dengan baik.

a. Tujuan

Dalam menentukan kegiatan untuk bisa dilaksanakan secara optimal diperlukan tujuan yang jelas. Karena dengan tujuan yang jelas, rangkaian kegiatan dapat terlaksana secara baik, sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

➤ Perlindungan Kepada Masyarakat

Dalam meringankan tugas dalam pengolahan sampah yang menumpuk agar masyarakat dapat peduli terhadap lingkungan, Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Satuan Polisi Pamong Praja memberikan apresiasi atau penghargaan kepada masyarakat yang sudah menjaga lingkungan dengan baik berupa sertifikat. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat mendorong daerah, maupun masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan lingkungan.

➤ Pengurangan Risiko

Pembentukan Satuan Tugas Pengelolaan Sampah yang melibatkan sejumlah pihak seperti jajaran TNI, Polri, dinas, pemerintah kecamatan, kelurahan dan masyarakat guna untuk membersihkan sampah dari lingkungan masyarakat dan tempat pembuangan sampah illegal, serta pelaksanaan sosialisasi untuk memberikan solusi bagi penanganan sampah di Kota Tasikmalaya.

b. Alternatif Keputusan

Saat memiliki tujuan ada sebuah kebijakan atau rangkaian kegiatan untuk melaksanakan dan mencapai tujuan tersebut dengan baik. Dimana dalam melaksanakan

tujuan tidak serta merta berhasil tanpa adanya hambatan. Sehingga diperlukannya kebijakan dalam pengambilan keputusan yang baik.

➤ Skala Prioritas

Pemerintah Kota Tasikmalaya membantu Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengoptimalkan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dengan cara fokus tangani pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya dan bekerja sama dengan peternak maggot untuk membantu pengendalian sampah organik menjadi barang yang bermanfaat.

➤ Kesesuaian/ Relevan

Dalam kesesuaian kebijakan dari program wajib jumat bersih ini yaitu, dengan cara Penjabat Wali Kota membagi di setiap titik TPS ilegal dan TPS yang sudah kelebihan muatan untuk dibersihkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan arahan TPS ilegal yang sudah dibersihkan harus dipasang garis peringatan dan spanduk larangan membuang sampah.

c. Sumber Daya yang dibatasi

Untuk mencapai suatu tujuan, banyak permasalahan yang dihadapi. Salah satunya sumber daya. Sehingga perlu adanya pembatasan sumber daya yang efisien agar tujuan tersebut dapat berjalan secara efektif.

➤ Anggaran

Anggaran yang mendorong kelancaran pelaksanaan program kegiatan wajib jumat bersih bersumber dari APBD dan selanjutnya diatur secara teknis terkait alokasi dana berdasarkan program dan kegiatan yang telah diajukan.

➤ Fasilitas

fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan masih kurang dan belum mampu mencukupi kebutuhan sehingga hal ini dapat menjadi hambatan dalam pencapaian optimalisasi penegakan peraturan perundang-undangan.

3.2 Faktor Penghambat dari Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya

Dalam optimalisasi penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas Satpol PP, antara lain: 1. Sumber daya manusia, kurangnya personil dalam menjalankan tugas karena wilayah kerja yang cukup luas menjadikan peranan serta tugas dan fungsi Satpol PP tidak maksimal. 2. Sarana dan Prasarana merupakan faktor

penunjang dan pendukung dalam melakukan aktivitas kegiatan untuk melaksanakan tugas dan organisasi, jika sarana dan prasarana tidak memadai maka akan mempengaruhi tingkat kerja dari pegawai serta bisa mengalami penurunan motivasi kerja. Hal ini terjadi karena sarana dan prasarana kurang menunjang pelaksanaan tugas, seperti kendaraan operasional yang digunakan masih terbatas, serta fasilitas lainnya seperti meja, kursi, komputer, printer masih kurang. 3. Anggaran, sumber pendanaan dari APBD daerah untuk Satuan Polisi Pamong Praja, dan pengadaan dana pribadi untuk penunjang kegiatan tidak akan cukup untuk mengcover semua sarana dan prasarana jika hanya mengharapkan anggaran dari APBD saja. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan pengelolaan sampah, terbukti dari masyarakat yang membuang sampah di lahan kosong, selokan air maupun sungai yang seharusnya dibuang ke tempat pembuangan sementara sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir.

3.3 Upaya Satpol PP dalam Optimalisasi Penegakan Perda tentang Pengelolaan Sampah

Pelaksanaan optimalisasi penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang dilakukan ini terkendala dengan banyak hal, namun Satpol PP menemukan cara dan jalan tengah dengan mengoptimalkan anggaran APBD yang diberikan langsung oleh pemerintah daerah kepada Satpol PP. Dalam pelaksanaan optimalisasi penegakan peraturan daerah terdapat kekurangan sumber daya manusia, yang mana butuh peningkatan jumlah dan kualitas. Namun, dikarenakan belum ada perekrutan anggota baru sehingga hanya memanfaatkan jumlah personil yang ada terlebih dahulu dengan mengatur jadwal piket yang baik.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada hal yang menarik untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan juga pemerintah terhadap pengelolaan sampah yang ada di Kota Tasikmalaya. Pengelolaan sampah yang ada di Kota Tasikmalaya memiliki beberapa kendala yang salah satunya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang di siapkan oleh pemerintah. Sarpras ini sebenarnya dapat disediakan oleh pemerintah terkait dengan angkutan dan juga alat pengelolaan sampah, namun dari lahan sangat sulit karena bermasalah dengan volume sampah yang cukup tinggi, sementara volume sampah yang dapat diangkut terbatas, alhasil sering terjadi penumpukan di TPS Pasar Kidul.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sudah berjalan cukup baik namun masih belum optimal dikarenakan pemerintah yang langsung mengeluarkan kebijakan seperti program wajib jumat bersih dan pembentukan Satuan Tugas Pengelolaan Sampah Tasik Resik masih memiliki beberapa hambatan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri, dengan keterbatasan SDM, Sarana dan Prasarana, dan anggaran, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan peraturan daerah tersebut.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan Satpol PP Kota Tasikmalaya dalam optimalisasi penegakan peraturan daerah kurang maksimal

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi kegiatan Satpol PP Tasikmalaya sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapa terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ajie. 2019. Pengawasan Pemerintah Kota terhadap pengelolaan sampah Kota Palangkaraya. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 2015 - e-journal.upr.ac.id

Kahfi. 2020. Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum, fakultas syariah dan hukum* 12-25. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661>

Fitri dkk. 2021. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu. *Jurnal Respon Publik* Volume 13, No. 4, Tahun 2019, Hal 12-18

Marimin. 2018. Peran Satpol Pp Dalam Pengawasan Tambang Emas Tanpa Izin Di Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumer Kabupaten Bengkayang. *M NIM - PUBLIKA- Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2018 - fisipuntan.org

Wira. 2015. Sistem Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. JOM FISIP Vol. 2 No. 2 Oktober 2015

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang *Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya*

